

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan yang sering terjadi pada suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya adalah bagaimana daerah tersebut dapat memelihara kestabilan dan pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan pemerintah daerah itu sendiri, yaitu bagaimana suatu daerah dapat mengenali dan mengidentifikasi secara tepat faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Menurut Budiono (1985 :1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Jadi persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Dalam mengamati kemungkinan perkembangan suatu perekonomian perlu di perhatikan simpul-simpul pertumbuhan yang ada. Kegiatan yang ada pada simpul atau titik pertumbuhan ini biasanya akan mampu menyebar ke sektor atau daerah lain melalui kekuatan pemerintah dan penawaran yang ada.

Pertumbuhan dengan pola ini biasanya akan mengikuti pola pertumbuhan yang sifatnya tidak seimbang. Kekuatan pemerintah yang sangat besar akan mendorong diciptakannya kegiatan dan produksi tertentu yang sering kali menjadi berlebihan. Pada gilirannya kegiatan ini akan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa dan kegiatan lain yang biasanya akan berkembang terlalu cepat dan menciptakan kelebihan permintaan lagi. Dalam kasus ini biasanya pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi kemacetan-kemacetan pertumbuhan yang terjadi dengan cara menyediakan perizinan dan prasarana, maupun perpajakan dan retribusi sebagai alat kontrolnya. (Suparmoko, 2002:102).

Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung. (John Maynard Keynes, 1936).

Tercakup dalam pengertian Undang-Undang Otonomi daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konsekuensi dari kedua Undang-Undang tersebut maka mau tidak mau pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kemampuannya menaikkan pendapatan asli daerah sehingga akan tetap mampu menjamin jalannya sistem pemerintahan di daerah beserta

dengan seluruh kehidupan politik, sosial dan ekonominya. Pendapatan asli daerah terutama berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak tergantung pada jumlah dan macam obyek pajak daerah, tarif pajak daerah serta dasar pajak daerah. Tarif pajak dan retribusi daerah tergantung pada kehendak pemerintah daerah untuk menetapkan dengan batas maksimum yang di tentukan oleh undang-undang, tetapi jumlah dan macam obyek pajak serta dasar pajak daerah akan tergantung pada kondisi perekonomian setempat. Apabila perekonomian daerah menjadi semakin maju, maka akan semakin banyak macam dan obyek pajak yang dapat di kenai pajak maupun retribusi daerah. Dengan kata lain agar pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah dapat meningkat, mau tidak mau perekonomian daerah yang bersangkutan harus didorong agar dapat berkembang dengan pesat pula. Perkembangan perekonomian daerah dapat terjadi karena penigkatan produktifitas dan pendapatan pada ekonomi yang sudah ada (intensifikasi), tapi dapat pula karena peningkatan produktifitas dan pendapatan sebagai akibat munculnya kegiatan usaha yang baru (ekstensifikasi), atau pula dapat terjadi ada perkembangan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam kondisi ekonomi yang demikian itu penerimaan pajak dan retribusi daerah pasti akan menigkat pula. Lebih-lebih apabila pemerintah menjalankan kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penarikan pajak dan retribusi daerah. (Suparmoko,2002:97- 98).

Ditinjau dari sudut pemerintah pusat masing-masing wilayah memiliki potensi yang berbeda. Dari sudut potensi, masing-masing wilayah memiliki keunggulan komperatif yang berbeda dan dapat di manfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Dari sudut tingkat pendapatan, masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Wilayah dengan tingkat pendapatan rendah memiliki MPC (*marginal propensity to consume*) yang tinggi. Hal ini bisa di gunakan untuk meningkatkan efek pengganda (*multiplier effect*) dari pengeluaran pemerintah pusat, (Robinson Tarigan,M.R.P,2004: 5-6).

Dari rumus *multiplier*, diketahui bahwa tingkat pajak akan mempengaruhi besarnya *multiplier* regional. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan *multiplier* regional. Pajak yang dipungut dari masyarakat terbagi atas pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut pemerintah propinsi, dan pajak yang dipungut pemerintah kota atau kabupaten. Untuk pajak yang dipungut dan ditentukan pemerintah atasan, baik jenis maupun besarnya tarif, pemerintah daerah bawahan tidak memiliki wewenang apapun atas pajak tersebut. Pemda kabupaten atau kota bersama DPRD setempat memang memiliki wewenang untuk menentukan tingkat tarif pungutan daerah (pajak dan retribusi) dengan meminta persetujuan pemerintah di atasnya (gubernur). Tarif pungutan daerah sebaiknya tidak melebihi tarif yang berlaku di daerah tetangga apalagi hal itu bisa menjadikan investor segan untuk

berinvestasi. Pemerintah daerah lebih baik mendorong bertambahnya potensi obyek pungutan dan menagih dengan tarif sedang dari obyek pajak yang makin besar dari pada menetapkan tarif yang tinggi dengan obyek pajak yang tetap kecil. Begitu juga penetapan tingginya tingkat pajak daerah sangat berkaitan dengan kondisi keuangan pemda yang bersangkutan, yaitu perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran minimal yang masih memungkinkan membuat roda pemerintahan berjalan secara wajar. Pemerintah daerah yang suka membuat tambahan atau menetapkan kenaikan tarif secara tidak wajar akan membuat investor takut masuk ke dalam daerah tersebut (Robinson Tarigan,M.R.P,2004:63-64).

Pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan tentang pentingnya proses pembentukan modal fiskal mungkin merupakan pendekatan yang paling populer. Keterbatasan modal dinilai sebagai hambatan pokok bagi percepatan pembangunan ekonomi di setiap negara. Selain itu, setiap kerangka perencanaan pembangunan di berbagai negara, terutama negara NSB (negara sedang berkembang) juga mencerminkan pandangan tersebut. Contoh paling nyata program REPELITA II di Indonesia pada tahun 1970-an. Program tersebut menunjukkan tentang betapa pentingnya modal awal dan perlunya suntikan awal modal asing (terutama dalam wujud bantuan luar negeri) yang cukup besar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adanya suntikan modal asing yang cukup besar tersebut diharapkan akan mampu

merangsang perkembangan ekonomi masyarakat. Keterkaitan antara tabungan, modal, dan pertumbuhan ekonomi telah ditunjukkan dengan baik sekali oleh pengalaman-pengalaman negara-negara industri. Misalnya, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sekitar setengah dari pertumbuhan pendapatan agregat pada 9 negara maju sejak tahun 1975 lebih disebabkan oleh adanya ekspansi *input* modal fiskal riil di negara tersebut (Lincoln Arsyad, 2010 : 183-185).

Gambaran kondisi perekonomian dapat dicerminkan oleh beberapa indikator makro ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator ekonomi makro tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB di wilayah Kabupaten Gunungkidul, nilai PDRB terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 sebesar 3,3 trilyun, dan terus meningkat menjadi 4,4 trilyun pada tahun 2006 sedangkan pada tahun 2008 ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan harga berlaku mencapai 5,5 trilyun rupiah atau naik 12,93 persen dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2007, nilai PDRB yang berhasil dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul mempunyai peranan dalam pembentukan PDRB Propinsi D.I Yogyakarta sebesar 14,78 persen.

Sedangkan untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi Kabupaten Gunungkidul juga mengalami kenaikan. Ini bisa dilihat dari penerimaan pajak

daerah pada tahun 2004 sebesar 2,7 milyar dan naik menjadi 5,1 milyar pada tahun 2007. Begitu juga dengan penerimaan retribusi yang mengalami kenaikan dari 11,5 milyar tahun 2004 menjadi 15 milyar pada tahun 2007. Kenaikan itu juga terjadi pada tahun 2008 yang menjadikan penerimaan pajak daerah sebesar 5,4 milyar dan penerimaan retribusi sebesar 17,2 milyar. Sedangkan laju investasi di kabupaten Gunung Kidul berdasarkan komulatif jumlah SIUP yang dikeluarkan tidak bisa stabil, terlihat pada tahun 2000 SIUP yang dikeluarkan sebanyak 89, dan mengalami penurunan menjadi 75 pada tahun 2003, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2008 menjadi 258 SIUP yang dikeluarkan (BPS, 2000-2008).

Berdasarkan uraian latar belakang ini maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Kidul Periode 1988 - 2008”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana pengaruh retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung Kidul?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung Kidul.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung Kidul.

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama pemerintah kabupaten Gunung Kidul dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Sebagai masukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Data-data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu data atau informasi yang dilakukan oleh instansi lain, yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari BPS dan data-data dari pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Data yang digunakan merupakan data runtut waktu (*time series*) mencakup tahun 1988- 2008.

2. Definisi Operasional variabel

a. Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan indikasi kenaikan pendapatan nasional yang dihitung dari PDB, namun disini penelitian yang berkaitan dengan

pertumbuhan ekonomi daerah maka indikasi yang dilihat dengan melihat kenaikan PDRB.

b. Penerimaan pajak daerah

Pajak daerah dipungut oleh daerah dan masuk dalam kas Pemerintah Daerah yang berdasarkan Undang-undang atau PERDA yang hasilnya nantinya akan digunakan untuk pembiayaan daerah.

c. Retribusi

Berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan publik.

d. Investasi

Berupa penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri. Sedangkan investasi itu bisa berupa mesin-mesin usaha maupun uang.

3. Teknik Analisa

untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi dan investasi terhadap PDRB (produk domestik Regional bruto) menggunakan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + U_t$$

Keterangan :

Y : produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X₁: pajak daerah

X₂: Retribusi Daerah

X₃ : Investasi

β₀: konstanta intersep

β₁: koefisien regresi pajak daerah

β₂: koefisien regresi retribusi

β₃ : koefisien regresi investasi

U_t : variabel pengganggu

untuk menganalisa kevaliditasan model maka dilakukan pengujian yang meliputi :

1. Uji R- *squared* (koefisien determinasi)
2. Uji t (uji secara individual)
3. Uji f (uji secara simultan atau bersama- sama)
4. Uji validitas asumsi klasik
 - a. Uji multikolinieritas
 - b. Uji heteroskedastisitas
 - c. Uji autokorelasi

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran